

6. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Garung, Kecamatan Kertek, Kecamatan Leksono, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil.

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sejumlah **Rp 6.558.537.848,-** atau sekitar **0,33 %** dari total APBD 2017 yang berjumlah Rp 2.000.613.704.761,-. Alokasi sejumlah **Rp 6.558.537.848,-** dapat terealisasi sejumlah **Rp 5.998.130.336,-** atau 91,46 %. Adapun program dan alokasi anggaran urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.B.6.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Sosial Tahun 2017

NO	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
	BELANJA LANGSUNG	3.646.006.000,00	3.478.192.153,00
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.061.800.000,00	1.026.571.800,00
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	447.500.000,00	437.235.162,00
3.	Program Pembinaan Anak Terlantar	45.000.000,00	42.010.000,00
4.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	560.000.000,00	559.900.000,00
5.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	75.000.000,00	74.572.000,00
6.	Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	10.000.000,00	10.000.000,00
7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.002.000.000,00	922.851.175,00
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.658.000,00	290.834.235,00
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128.048.000,00	114.217.781,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.912.531.848,00	2.519.938.183,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017

b. Realisasi Program dan Kegiatan**1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**

Tujuan program ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran bagi kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : Pemberdayaan Potensi dan PMKS dan Pendampingan Program Keluarga Harapan, Pendistribusian Raskin dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Kegiatan Pasar Murah Menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan Pemberdayaan Potensi dan PMKS dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan

terhadap keluarga rawan sosial dan ekonomi dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama bagi 3 KRSE (Kelompok Rawan Sosial Ekonomi) di 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Kec. Garung, Kec. Kalikajar, dan Kec. Wonosobo.

Untuk mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program nasional berupa bantuan sosial bersyarat. Persyaratan tersebut yaitu bagi keluarga kurang mampu yang sedang menyekolahkan anaknya dan atau sedang hamil dan atau mempunyai anak balita, dengan harapan agar terjadi perubahan perilaku masyarakat kurang mampu di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2017 penerima bantuan PKH untuk wilayah Kabupaten Wonosobo sejumlah 34.552 Rumah Tangga, turun 5%, jika dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu sejumlah 36.391 RTS. Penurunan RTS terjadi karena, banyaknya RTS yang sudah tidak memenuhi komponen sebagai penerima manfaat program dan penerima manfaat yang sudah meninggal dunia.

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada PMKS, memperbaiki dan berusaha menembalikan PMKS ke dalam tataran sosial masyarakat agar PMKS bisa berperan kembali dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu pemberian bantuan peralatan bagi penyandang cacat sebanyak 112 orang berupa 49 unit kursi roda, 12 unit kruk, 5 unit kaki palsu, 3 unit tangan palsu dan 40 unit alat bantu dengar, 50 unit tripot dan 12 unit walker, disamping itu juga dilakukan bimbingan, pemberian bantuan UEP dan bantuan sosial lainnya bagi 123 Orang.

Upaya perlindungan kepada PMKS dilakukan melalui pelayanan dan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, pemulangan orang terlantar dan kehabisan bekal, serta melakukan pembayaran biaya rumah sakit termasuk biaya pengiriman dan pemulangannya.

3) Program Pembinaan Anak Terlantar

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak terlantar melalui pembinaan dalam bentuk kegiatan Penanganan Anak Terlantar dan Putus Sekolah bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Anak Putus Sekolah, Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dengan mengadakan pengiriman pelatihan ketrampilan Boga, Salon dan Perbengkelan bagi remaja putus sekolah sehingga mereka dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan berwirausaha. Pada tahun 2017 anak terlantar yang dibina sebanyak 956 anak, yang mana anak-anak tersebut memperoleh pelayanan kebutuhan dasar karena pada dasarnya mereka bertempat tinggal di panti, sedangkan untuk 51 (lima puluh satu) anak terlantar mendapatkan pelatihan ketrampilan, yaitu dengan dikirim ke Balai Rehabsos Dharma Putra Purworejo, Balai Rehabsos Mandiri Semarang, Balai Rehabsos Taruna Yudha Sukoharjo, Balai Rehabsos Kartini Tawangmangu, dan Balai Rehabsos Wira Adhi Karya Ungaran.

Peningkatan kualitas anak terlantar/ditelantarkan dapat melalui adopsi oleh orang tua angkat/asuh, karena dalam hal ini berkaitan dengan aspek legal dan masa depan anak dan keluarga yang bersangkutan, maka diperlukan suatu kegiatan pendampingan adopsi. Pada tahun 2017 jumlah anak yang diadopsi di Kabupaten Wonosobo sejumlah 20 (dua puluh) permohonan adopsi anak.

4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan bagi penyandang cacat dan trauma terutama bagi yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga perlu penanganan dari orang/pihak lain. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penertiban dan Pembinaan Tuna Sosial, Fasilitasi Kegiatan Hari Disabilitas Internasional dan Asistensi Sosial kepada Penyandang Cacat Berat.

Sebagai upaya pemantauan dan pembinaan kepada tuna susila dan PGOT dilakukan melalui penjangkaran/razia dan penertiban serta pengiriman ke panti pelayanan sosial oleh bagian Sosial dan Kesra bekerjasama dengan Satpol PP.

5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan bagi panti asuhan/panti jompo agar dapat berdaya, efektif dan mandiri. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial karena keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang operasional pelayanan sosial dengan bantuan sarpras bagi panti sosial untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di kecamatan Wadaslintang dan Lembaga Sosial/Panti Sosial.

6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program ini merupakan upaya rehabilitasi bagi penyandang penyakit sosial, yang bertujuan untuk menyiapkan masa depan para penyandang penyakit sosial agar mereka dapat kembali hidup bermasyarakat secara mandiri. Pola pembinaan yang dilakukan yaitu melalui pemberian stimulan transportasi bagi 12 (dua belas) penderita penyakit kronis (TBC) dari keluarga tidak mampu agar tetap dapat melanjutkan pengobatan penyakitnya.

7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diharapkan bisa menjawab permasalahan kesejahteraan utama masyarakat, yaitu kemiskinan, disamping dapat merubah potensi menjadi sumber kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Fasilitasi Pendampingan Pengiriman Pelatihan Kader Sosial, Operasional TKSK, Bulan Bhakti Karang Taruna, Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S), Fasilitasi Porseni Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi PSKS (PSM/TKSM/IKPW/TAGANA, dll), Bantuan Operasional Masjid Jami', Fasilitasi Kegiatan GOPTKI, Fasilitasi LGN-OTA, Fasilitasi Komda Lansia, Fasilitasi BAZNAZ Kabupaten Wonosobo, Fasilitasi FKDT, Silaturahmi Tokoh Agama dan Hari Santri Nasional.

Melihat peran yang begitu besar, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membina dan mendukung keberadaan lembaga kesejahteraan sosial ini. Beberapa wujud pembinaan terhadap lembaga ini yaitu berupa pelatihan dan bintek penanganan PMKS yang diikuti oleh 15 (lima belas) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 5 (lima) pengurus karang taruna, 3 (tiga) orang Tagana, 4 (empat) orang PSM, pengurus LKS 3 (tiga) orang dan pengiriman pelatihan kader sosial ke stakeholder terkait selama tahun 2017 sebanyak 90 orang.

Dukungan untuk keberadaan kelembagaan sosial masyarakat dalam rangka penanganan PMKS, telah dialokasikan anggaran untuk operasional TKSK dan fasilitasi PSKS guna meningkatkan peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanganan PMKS. PMKS sebagai bagian dari masyarakat tentunya juga membutuhkan wahana kreativitas untuk mengaktualisasi kemampuan dan potensinya yang dilakukan

III.B.6. Urusan Wajib Sosial

melalui lomba porseni bagi lembaga kesejahteraan sosial, yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 12 November 2017 di Don Bosco Wonosobo.

c. Capaian Kinerja Urusan Sosial

Tabel III.B.6.2
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD

No.	Indikator	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	17	17	17
2	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial	DTD	19	9,31
3	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	44,20	26,48	20,65

Sumber: Dinas Sosial PMD dan Bagian Kesra Setda Tahun, 2017

Berdasarkan tabel di atas terdapat peningkatan capaian kinerja pada urusan sosial pada Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menjadi 44,70 % dibandingkan tahun 2016, tetapi menurun pada persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial hanya 9,31 % karena hanya 366 orang dari 3.932 orang yang harus menerima sehingga masih sangat diperlukan upaya agar semua dapat menerima.

Tabel III.B.6.3
Capaian Kinerja Urusan Sosial
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase PMKS yang terlayani jaminan sosial	90	89,72	86,19	96,07	→
2	Persentase PMKS yang mendapat bansos	26,48	46,20	20,65	44,70	↓
3	Persentase panti yang menyediakan sarpras kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	DTT	38,84	88,24	227,19	○
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	19	10	9,31	93,10	→
5	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	8	37,6	2,92	7,71	↓
6	Persentase anak terlantar, balita terlantar, ABH, anak dengan kecacatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	71,2	52	41,95	80,67	↓
7	Persentase penyandang cacat dan trauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	DTD	58	14,06	24,24	↓

III.B.6. Urusan Wajib Sosial

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
8	Jumlah panti sosial	17	17	17	100	○
9	Presentase panti sosial berbadan hukum	94,1	65	88,24	135,75	○
10	Presentase lembaga sosial yang berbadan hukum	45	43	46	106,98	○
11	Persentase kenaikan zakat di lembaga ZIS	(-)4,31	5	(-)7,28	(-)145,6	↓
12	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	26	46,27	39,67	84,80	↓
13	Cakupan Raskin terhadap Rumah Tangga Miskin	61,60	65,16	87,36	134,07	○
14	Persentase rata-rata kenaikan PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi	11,5	3	2,89	96,33	→

Sumber : Dinsos PMD, Bagian Kesra dan Bagian Pemerintahan Setda, 2017

Keterangan Status Capaian :

- Tercapai Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
- Tidak tercapai Realisasi capaian 90% - 99%
- ↓ Tidak tercapai dan perlu upaya keras Realisasi capaian $\leq 90\%$

Panti sosial sebagai sarana pembinaan dan penampungan bagi PMKS di Kabupaten Wonosobo sejumlah 17 panti terdiri dari 12 panti asuhan anak, 1 panti sosial tresna werda (panti jompo), 1 panti sosial bina laras, 2 panti sosial bina rungu wicara, 1 rumah singgah/ Shelter dan pada tahun 2017, semua panti telah berbadan hukum artinya secara kelembagaan sudah mendapat pengakuan dari kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Kelembagaan Sosial yang sudah berbadan hukum sesuai tabel diatas mencapai 46 % meskipun meningkat 1 % dibandingkan tahun 2016 tetapi sudah diatas target yang telah ditetapkan dalam RKPD 2017.

Upaya pemberdayaan PMKS dimaksudkan agar PMKS dapat hidup mandiri. Kenaikan rata-rata PMKS mandiri mencapai 2,89 % masih dibawah target RKPD tahun 2017 meskipun % realisasi capaian tahun 2017 mencapai 96,33 %, sehingga pada tahun berikutnya PMKS mandiri harus lebih ditingkatkan mencapai 100 %.

Capaian kinerja terhadap Persentase Kenaikan Zakat di Lembaga ZIS juga perlu mendapat perhatian, berdasarkan tabel di atas pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan zakat di 4 lembaga ZIS dari 6 (enam) yang tercatat, yaitu KSPPS BMT Marhamah, BMT Melati, LAZISMU dan BAZNAS sedangkan yang naik yaitu KSPPS TAMZIS BINA UTAMA dan KSPPS AL HUDA, sehingga % realisasi capaian tahun 2017 terjadi penurunan hingga 145,6 %. Penurunan sejak tahun 2015 sejumlah Rp. 2.638.325.608,- menurun pada tahun 2016 sejumlah Rp. 2.524.513.726,- dan tahun 2017 sejumlah Rp. 2.340.711.474,-. Penurunan ini dikarenakan hanya 6 lembaga ini yang melaporkan

III.B.6. Urusan Wajib Sosial

sehingga perlu lebih didorong kesadaran lembaga ZIS yang lain untuk dapat melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo sehingga dapat dilihat capaian kinerja secara keseluruhan.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.B.6.3
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	4
	b. S-1	9
	c. DI-DIV	5
	d. SMA	8
	e. SMP	1
	f. SD	1
	Jumlah	28
2	Golongan	
	a. Golongan IV	4
	b. Golongan III	17
	c. Golongan II	6
	d. Golongan I	1
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	28
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	-
	c. Esselon IV	4
	Staf/Fungsional Umum	24
	Jumlah	28

Sumber : BKD Kab. Wonosobo, 2018

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel III.B.6.4
Kondisi Sarana dan Prasarana

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
	ASET TETAP	3.680.668.305,00
01	Tanah	359.698.185,00
02	Peralatan dan Mesin	2.101.007.720,00
	Alat-alat Besar	0,00
	Alat-alat Angkutan	1.120.520.500,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	919.521.220,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	60.966.000,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	1.219.962.400,00
	Bangunan Gedung	1.219.962.400,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	Jalan dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
		0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial serta upaya yang perlu dilakukan adalah :

Tabel III.B.6.3
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Sosial

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Data PMKS belum valid/lengkap	Menyusun rencana dan mekanisme pendataan PMKS yang didahului dengan penyusunan instrumen-instrumen sebagai dasar pendataan, sehingga hasil pendataan

III.B.6. Urusan Wajib Sosial

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
		PMKS lebih akurat dan <i>up date</i> .
2.	Tidak terlayannya penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam keluarga miskin oleh berbagai program karena ketidaktahuan keluarga maupun ketidakmampuan program menjangkau keberadaannya	Keterlibatan sejumlah pekerja sosial dan menyalurkan para penyandang PMKS ke beberapa unit-unit rehabilitasi (UPT dan Panti Asuhan Negeri/Swasta)
3.	Keterbatasan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana serta belum adanya tenaga fungsional (pekerja dan penyuluh sosial) bagi penyelenggaraan kegiatan pelayanan/rehabilitasi dan keberagaman kondisi serta keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Meningkatkan kualitas PSKS dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat lainnya, antara lain TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial dan kelembagaan sosial di tingkat lokal. • Menyusun skala prioritas dalam penentuan sasaran
4.	Kurangnya koordinasi di kalangan dinas/instansi dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam keluarga miskin	Membentuk pokja untuk pelayanan PMKS dalam keluarga miskin, antara lain dengan Disdukcapil dalam rangka membantu fasilitasi pembuatan KK untuk keluarga miskin dan terlantar
5.	Masih kurangnya kebijakan-kebijakan daerah tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial yang bisa menjangkau semua permasalahan sosial.	Menyusun suatu kebijakan tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial.
6.	Kurangnya Kesadaran Lembaga ZIS untuk melaporkan penerimaan dan pendistribusian ZIS di wilayah Kabupaten Wonosobo	Koordinasi dan komunikasi yang intensif kepada semua Lembaga ZIS yang ada di Kabupaten Wonosobo
7.	Belum adanya SOP yang baku dalam pelayanan PMKS	Menyusun SOP yang disesuaikan dengan SPM dan kondisi daerah